

**AGAMA DAN PENDIDIKAN: ANALISIS RELASI DAN IMPLIKASINYA
DALAM UPAYA PENGEMBANGAN EKONOMI****Mohammad Thoyyib Madani**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang

Email: oyibmadani@gmail.com**PENDAHULUAN**

Bagi orang yang beriman, agama merupakan elemen yang paling fundamental dalam kehidupan.¹ Dikatakan demikian, karena ia tidak hanya terkait dengan keimanan pemeluknya, namun lebih dari itu agama juga merupakan perangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai sakral yang sangat diyakini kebenarannya, sempurna dan komprehensif. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang tidak lekang ditelan zaman tersebut dianggap mampu menjadi energi yang positif tidak hanya pada perilaku individu tetapi juga perilaku sosial-ekonomi. Agama dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan persoalan individu tetapi juga berkaitan dengan permasalahan sosial-ekonomi. Islam misalnya, bukan hanya sekedar agama yang bersifat individual tetapi juga sosial. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Qur'an mengandung dimensi sosial termasuk ekonomi. Proses internalisasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama oleh individu pemeluk agama dalam banyak segi berkaitan erat dengan pendidikan yang bersifat sosial. Transformasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai serta pewarisan budaya Islam dari generasi ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat relasi yang erat antara agama, ekonomi dan pendidikan.

Auguste Comte seorang filsuf-sosiolog Perancis kenamaan pada pertengahan abad 19 telah meramalkan adanya kebangkitan ilmu dan keruntuhan agama dan ia yakin bahwa masyarakat berevolusi dan berkembang dari tingkat primitif ke tingkat modern. Ia mengemukakan bahwa ditinjau dari segi perkembangannya, metafisika adalah transisi dari teologi ke ilmu pengetahuan. Pada abad yang sama filsuf Jerman Friedrich Nietzsche juga meramalkan bahwa - paling tidak dalam konteks dunia Barat - Tuhan telah mati. Para filsuf Barat telah memprediksi banyak peristiwa tersebut dan menyambutnya sebagai persiapan akan datangnya suatu tatanan dunia yang terbebaskan dari Tuhan dan agama sepenuhnya.²

¹Istilah agama (*religion*) dalam Islam dikenal dengan term *din*, menurut al-Attas maknanya tidak sama dengan konsep agama sebagaimana yang biasanya diinterpretasikan dan dipahami dalam sejarah dan peradaban keagamaan Barat. Pengertian agama sebagai din dimana semua konotasi dasar yang berkaitan dengan term din dilukiskan sebagai terpadukan kedalam din kesatuan yang saling kait mengkait seperti tercermin dalam Al-Qur'an dan Bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab arti utama dari istilah din dapat diringkas menjadi empat yaitu: (1) keberhutangan; (2) kepatuhan (3) kekuasaan bijaksana (4) kecenderungan alami atau tendensi. Lihat dalam Syed Muhammad Al-Naqib Al-Attas. *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1984), h. 71-72).

²Al-Attas, *Ibid.*, 2.

Peradaban Barat didasarkan pada prinsip pemisahan Agama dan Negara. Manusia dianggap swasembada. Dengan demikian, masalah sosial, ekonomi, politik dan teknologi dari peradaban manusia digenggam tanpa mengacu pada bimbingan Tuhan. Tuhan mungkin disembah dalam kehidupan pribadi seseorang. Namun, urusan masyarakat dan ekonomi dilakukan menurut kebijaksanaan dan kedaulatan manusia sendiri. Penaklukan alam telah menjadi target utama usaha manusia. Arus peradaban, bagaimanapun, tampaknya berjalang sendirinya tanpa mengacupadani lautan prinsip agama yang diturunkan Tuhan kepada umat manusia melalui para nabi-Nya. Dunia Muslim tidak terkecual dalam kondisi yang sama. Model ekonomi dan masyarakat yang berkembang selama dua ratus tahun terakhir ini, terutama dalam tradisi sekularisme Barat. Tiga dekade terakhir telah menyaksikan munculnya lebih dari empat puluh negara Muslim yang merdeka namun sistem politik-ekonomi yang diperoleh di negara-negara tersebut terus didasarkan pada model-model Barat. Ini adalah kontradiksi yang coba ditantang oleh kebangkitan kembali Islam.³

Kebangkitan Islam kontemporer bukanlah artikulasi politik temporer dari umat Islam atau hanya letupan kemarahan terhadap negara-negara Barat. Sebaliknya, ini merupakan respon positif dan kreatif Muslim terhadap tantangan Ideologis peradaban barat. Bagi dunia Muslim, ini adalah upaya untuk mencoba merekonstruksi masyarakat dan ekonomi dengan memanfaatkan sumber-sumber agamanya sendiri yang kaya tetapi terabaikan. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk membentuk tatanan sosial yang adil di mana aspek material dan spiritual disatukan, sehingga 'kemajuan' dan 'doa' tidak mewakili dua kompartemen kedap air tetapi dua sisi dari mata uang yang sama, dimana doa bertindak sebagai batu loncatan untuk kemajuan dan kemajuan manusia menuju pemuliaan Sang Pencipta.⁴

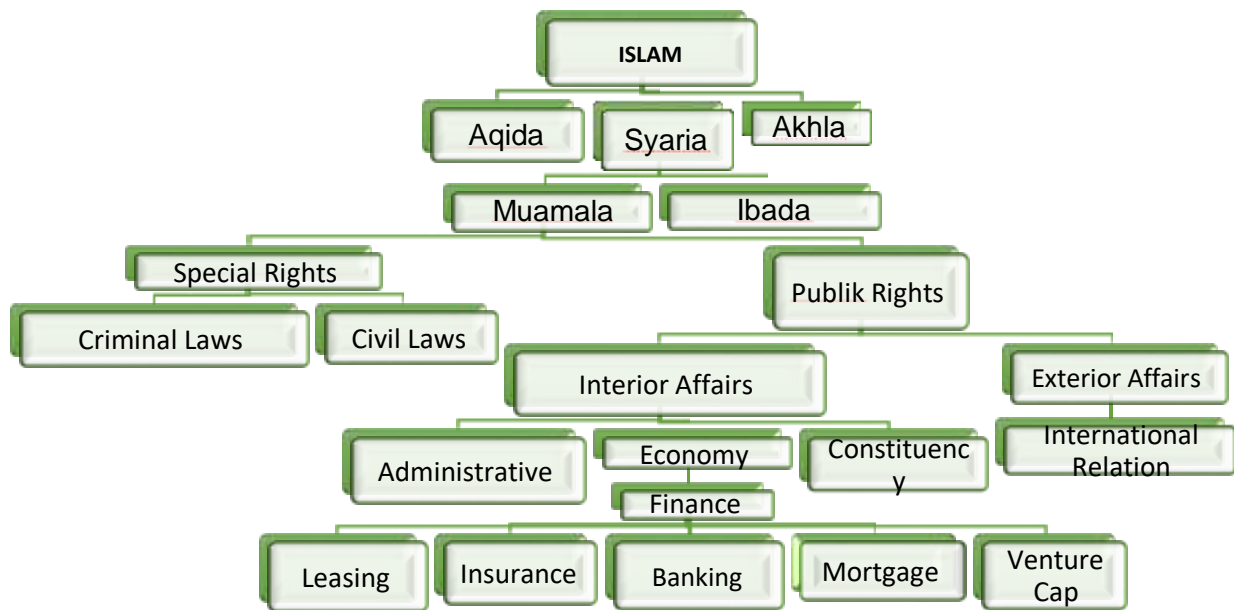
Islam adalah cara hidup yang lengkap dan perbedaan antara nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan realitas sosial yang dipenuhi sekularisme merupakan akar dari ketegangan yang merembes ke dunia Muslim saat ini. Kebangkitan Islam merepresentasikan pendekatan baru — yaitu berusaha merekonstruksi ekonomi dan masyarakat sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam serta kebutuhan hidup kontemporer. Ada pencarian baru untuk menemukan makna dan pesan Islam yang sebenarnya dengan mengambil sumber asli Islam - Al-Qur'an dan sunnah Nabi (alaihissalam) - dan berdasarkan pengalaman sejarah umat Muslim. Upaya sedang dilakukan hampir setiap bidang kehidupan individu dan sosial untuk menilai relevansi Islam dan untuk mencari cara dan sarana untuk mengubah kesadaran ini menjadi kenyataan sosial ekonomi. Disiplin sosial ekonomi Islam yang baru lahir merupakan salah satu

³Khurshid Ahmad. 1981. *Studies in Islamic Economics*. (Jeddah: International Centre For Research In Islamic Economics), h.xiii.

⁴Khurshid Ahmad, *Ibid.* h.xiii.

u respon kreatif dari ekonom Muslim dan 'Ulama'.⁵

⁵Khurshid Ahmad, *Ibid.* h. xiii- xiv.



Relasi Agama dan Ekonomi

Selama ini, ada opini bahwa agama tidak dapat menggerakkan kehidupan ekonomi, lebih-lebih ekonomi kapitalis. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa agamadanekonomimerupakan duaranahberbedayangmemilikititiktekandantujuan yang berbeda pula. Antara keduanya, selamanya tidak akan pernah sehaluan. Max Weber (1919) kemudian tampil dengan esainya yang paling terkenal berjudul ‘*Die Protestantische Ethik und der Geist Des Capitalismus*’ (*Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*)’ (Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme), sebuah pandangan baru yang seakan menegaskan anggapan tersebut. Weber dengan sangat piawai menunjukkan keterkaitan yang erat antara doktrin-doktrin agama yang puritan dengan realitas sosial dan perilaku ekonomi, terutama dalam perkembangan industri modern sehingga melahirkan corak dengan ragam nilai yang menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sosok individu; keberhasilan di dunia merupakan gambaran kebahagiaan di akhirat kelak.⁶

Bahkan dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Kendatipun pandangan ini berasal dari pemikir barat namun tidak sedikit darikalangan pemikir muslim yang mengamininya. Persepsi yang salah ini disebabkan lantaran adanya kesalahpahaman terhadap Islam. Seakan-akan Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual belaka, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi serta industri perbankan

⁶Talcott Parson, ‘Pendahuluan’ dalam Weber, Max. 1919. *Sosiologi Agama*. Jakarta: IRCISOD.

sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.⁷

Sjafruddin mengungkapkan bahwa, dalam kehidupan ekonomi perilaku individu didorong oleh dua motif, yaitu motif ekonomi dan motif agama atau moral. Motif ekonomi terdorong karena adanya rasa takut terhadap kekurangan. Hal ini mendorong individu berupaya mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Perasaan takut dapat memantik manusia menjadi makhluk serakah yang tidak mempunyai perasaan belas kasihan terhadap sesama manusia. Sebaliknya agama, menurut Sjafruddin, mengajarkan manusia menjauhkan diri dari perasaan takut. Yang wajib ditakuti hanyalah Allah. Jika manusia benar-benar takut dan taat kepada Allah, ia tidak perlu takut terhadap kekurangan atau kelaparan. Sehingga orang tersebut tidak mengenal istilah gentar menghadapi cobaan apa pun. Maka, jika orang itu diganjar dengan kemiskinan, dia menerima nasibnya tersebut dengan hati yang ringan sambil bekerja dan berdoa. Semoga Tuhan berkenan memberi rezeki dan mengubah nasibnya. Akan tetapi, apabila dia dengan tiba-tiba diganjar dengan harta kekayaan yang melimpah, kata Sjafruddin, ia pun tidak akan menjadi takabur. Dia pun tidak akan mengumbar hawa nafsu rendahnya dan mengobral kekayaannya itu untuk memuaskannya.⁸

Dewasa ini, ketimpangan ekonomi secara global antara orang yang kaya dan yang miskin semakin melebar dan menganga. Merujuk hasil survei Oxfam (2017), jumlah harta delapan orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan 3,6 miliar penduduk miskin dunia. Jumlah penduduk miskin ini hampir separuh dari jumlah penduduk dunia, yaitu sekitar 7,4 miliar (2016). Harta miliarder dunia mencapai 426 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.668 triliun, sedangkan harta 3,6 miliar penduduk miskin dunia mencapai 409 miliar dolar AS atau Rp 5.465 triliun. Demikian juga kondisi di Tanah Air. Merujuk Credit Suisse (2016), masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan di bawah 10 ribu dolar AS mencapai 84,3 persen, sedangkan mereka yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta dolar AS hanya 0,1 persen. Ketimpangan atau ketidakmerataan kekayaan masih menjadi persoalan di Tanah Air. Simpanan tabungan dan investasi yang tidak merata membuat ketimpangan yang terjadi di Indonesia masih terjadi lumayan besar. Pertanyaannya adalah mengapa ketimpangan ini semakin parah? Menurut Sjafruddin Prawiranegara dalam bukunya *Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia* (1988), ketimpangan antara kaya dan miskin terjadi karena agama dan ekonomi telah dipisahkan. Kata Sjafruddin, agama harus diundang dan dilibatkan dalam kehidupan ekonomi dan pasar agar kehidupan ekonomi dan pasar menjadi tempat yang ramah bagi semua pihak. Ini berarti, Sjafruddin tidak menginginkan suatu tatanan kehidupan ekonomi bahkan jugapolitik yang tunanilai, tetapi dia menekankan harus sarat nilai. Sumber nilai adalah agama. Agama dan moral tidak boleh dipisahkan

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3.

⁸Anwar Abbas (2018), *Beda sekali antara sistem ekonomi Islam, liberal, dan sosialisme*. <https://www.republika.co.id/berita/p4tkvr440/agama-dan-ekonomi>.

diperintah untuk mencari nafkah yang tujuannya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya.

Dalam upaya mencari nafkah, menurut Sjafruddin, seseorang harus memperhatikan halal dan haramnya sumber pendapatan tersebut. Sumber mata pencaharian yang halal tersebut menurut Sjafruddin ada tiga macam. *Pertama*, usaha dan kerja sendiri dengan cara yang diridhai Allah SWT. *Kedua*, dagang, yaitu pertukaran barang atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan suka sama suka, tidak boleh ada unsur curang atau paksaan. Dagang harus bersih dari unsur-unsur curang atau batil dan paksaan atau riba, juga spekulasi yang bersifat judi terlarang. *Ketiga*, pemberian yang diberikan dengan sukarela. Tetapi, kita harus tahu, menurut ajaran Islam, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Pemikiran Syafruddin yang disajikan di atas, menjadi renungan penting dalam membangun ekonomi bangsa saat ini yang semakin timpang dan akut karena memisahkan agama dengan aktifitas ekonomi dan mengabaikan prinsip-prinsipnya dan melupakan nilai-nilai moralitas, terutama persoalan keadilan sosial dan ekonomi.¹¹

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Muhammad Ali Jinnah menyatakan bahwa penerapan teori dan praktek ekonomi Barat tidak akan membantu kita dalam mencapai tujuan kita untuk menjadi orang yang bahagia dan sejahtera. Kita harus menentukan nasib kita dengan cara kita sendiri dan menghadirkannya kepada dunia sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep agama Islam tentang persamaan umat manusia dan keadilan sosial yang sebenarnya. Dengan demikian, kita akan menunaikan misi kita sebagai Muslim dan memberikan kepada umat manusia pesan perdamaian yang hanya dengannya kita dapat menyelamatkan dan menjamin kesejahteraan, kebahagiaan dan kemakmuran umat manusia.¹²

Teori-teori ekonomi konvensional dibangun berdasarkan landasan filosofis barat yang sekuler yang mengabaikan akan nilai makna-makna kehidupan manusia. “Karl Mark mereduksi makna tindakan sosial manusia hanya dalam kerangka ekonomi. Ia melihat makna tindakan manusia hanya sebagai jaringan ribuan sekumpulan yang menghubungkan dan menghidupkan bagian-bagian mesin-mesin ekonomi dalam proses produksi. Manusia dikelompokkan ke dalam kelas atas dasar status lahir: Kelas pemilik modal (capitalists), tuan tanah (landowner) dan kelas pekerja (labour). Kelas ini memunculkan konflik antara kelas kapitalis dan kelas proletar. Konflik kepentingan ekonomi kelas-kelas itulah, fatwa Mark, yang menggerakkan sejarah manusia selama berabad-abad. Ujungnya adalah revolusi proletar yang tak pernah terwujud itu. Manusia dipandang Mark hanya sebagai komoditi ekonomi alias makhluk yang dalam tindakan sosialnya

¹¹Anwar Abbas, *Ibid.*

¹²M.A Mannan. *Islamic Economics Theory and Practice* (Delhi: Idarah-I Adbiyat-I, 1990.),

tidak memiliki nilai-nilai lain sebagai dasar motivasi selain ekonomi adalah keagalannya yang fatal dalam memahami esensi manusia dan perilakunya. Tak jauh berbedadengan Mark, demikian juga Weber. Mengelaborasi teori Mark, bagi Weber manusia melakukan tindakan sosial (social action) tidak hanya karena niat-niat ekonomi semata, melainkan juga motivasi-motivasi status, prestise dan harga diri.¹³

Relasi Pendidikan Dan Ekonomi

Ibnu Khaldun melihat adanya relasi antara faktor ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan. Meskipun dalam karya yang terkenal *al-Muqaddimah* membahas faktor-faktor ini secara terpisah, ia menganggapnya sebagai "aspek peradaban yang mempengaruhi manusia dalam organisasi sosial mereka" yang saling terkait.¹⁴

Disamping, filsafat, sejarah, politik, psikologi, dan sosial, ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan yaitu aspek ekonomi dalam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk interaksi manusia. Pendidikan merupakan aktivitas sosial yang terjadi melalui suatu jaringan relasi-relasi kemanusiaan. Jaringan-jaringan tersebut beserta relasi dan peranan individu menentukan karakter pendidikan suatu masyarakat. Aspek-aspek sosial pendidikan dapat dideskripsikan dengan mengamati ketergantungan antara individu-individu yang satu dengan yang lainnya dalam proses belajar. Pendidikan dan ekonomi selalubergandeng sejak dari jaman dulu kala. Para pakar ekonomi sejak zaman dulu menyadari dan mengakui akan pentingnya peranan yang dimainkan oleh pendidikan dalam pengembangan pengetahuan manusia secara umum dan ekonomi secara khusus. Bidang ekonomi yang sangat relevan dengan pendidikan biasanya yang terkait dengan investasi. Karena pendidikan itu sesungguhnya merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Maksudnya kalau modal diinvestasikan dalam jumlah dan jangka tertentu kapan modal tersebut akan kembali/ titik impas (*break- even point*) dan berapa keuntungan yang akan diperoleh sebagai konsekuensi dari pendidikan yang dicapai. Kendatipun hasil pendidikan tidak selalu harus diukur dengan uang, tetapi juga dengan hal-hal yang tidak bersifat materi, seperti status, prestise, kebahagiaan, kesempatan, penghargaan yang tidak kasat mata tetapi dapat dirasakan bagi individu yang memperoleh pendidikan tersebut.¹⁵

Disamping itu, pendidikan merupakan salah satu faktor produksi. Dalam teori ekonomi klasik tenaga manusia ditambah dengan tanah menghasilkan hasil produksi.

¹³Muflich Hasbullah, xi.

¹⁴M.A Mannan. *Ibid.*, 8-9.

¹⁵Hasan Langgulung, *Ibid.*, 20.

Sedangkan dalam teori ekonomi neo- klasik, tanah dan tenaga harus dibedakan dari modal fisik yaitu alat-alat seperti perkakas dan bangunan dalam proses produksi. Belakangan ini tenaga dibagi lagi menjadi tenaga tulen dan sederhana dan terampil. Istilah yang terakhir ini disebut dengan modal manusia (*human capital*) yang dianggap salah satu faktor yang paling penting dalam proses produksi. Formulasi ini memiliki implikasi yang penting terhadap berbagai aspek teori ekonomi, khususnya terkait dengan teori pertumbuhan ekonomi (*Economic development*). Awalnya pengumpulan modal fisik dianggap kunci ke arah pertumbuhan ekonomi. Tetapi kajian-kajian yang terakhir menunjukkan bahwa kontribusi modal manusia juga tidak kalah pentingnya atau minimal sama pentingnya dengan modal fisik. Bahkan banyak kadar pertumbuhan dapat dijelaskan menurut hasil modal manusia (*humancapital*). Oleh karena itu, jika pengumpulan modal manusia dapat dipercepat maka kadar pertumbuhan akan meningkat. Dewasa ini, modal manusia diperluas tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga pelatihan dalam pekerjaan (*on-job-training*) dan cara-cara lain untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan. Perkembangan tersebut sangat penting sebab berimplikasi pada penambahan anggaran belanja dalam pendidikan, *on job training* dan penelitian.¹⁶

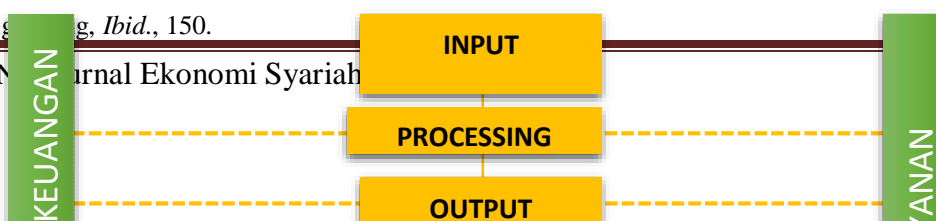
Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya bahwa relasi antara ekonomi dan pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri merupakan produk abad kedua puluh. Akan tetapi, relasi pendidikan dan ekonomi telah ada seumur dunia ini. Dalam sejarah pendidikan Islam tampak relasi antara ekonomi dan pendidikan itu amat sangat erat sekali, khususnya yang tercermin dalam lembaga wakaf yang menjadi sumber keuangan lembaga- lembaga pendidikan Islam. Akan tetapi, teori yang mengkaji relasi antar ekonomi dan pendidikan itu merupakan perkara yang baru. Tidak ada salahnya umat Islam menggunakan teori tersebut untuk memperbaiki kondisi dan kualitas pendidikan asalkan tidak kontradiksi dengan prinsip-prinsip utama yang terkait dengan pandangan hidup Islam (*weltstanchasaung*). Jika dalam pendidikan Islam telah meletakkan asas-asas yang menjadi fondasi berdirinya pendidikan Islam itu maka hal yang sama juga terjadi dalam ekonomi Islam telah meletakkan asas-asas utama sebagai tempat ekonomi Islam itu berdiri. Berikut ini kita uraikan pandangan Islam tentang ekonomi dan relasinya dengan pendidikan.¹⁷

Implikasinya dalam Upaya Pengembangan Ekonomi

Sudah dimaklumi, bahwa kajian ekonomi berpusat pada tingkah laku manusia dalam mendayagunakan sumber- sumber yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Karenanya termasuk dalam ilmu sosial. Adapun tugas utama ilmu sosial, disamping melukiskan, juga menerangkan atau menjelaskan dan penafsir

¹⁶Hasan Langgulung, *Ibid.*, 20.

¹⁷Hasan Langgulung, *Ibid.*, 150.



an rasional mengenai realita sosial yang terjadi. Fenomena ekonomi adalah memperbincangkan perilaku baik perorangan atau perusahaan (mikro), maupun masyarakat atau bangsa (makro), dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Ini mempunyai kekuatan yang erat dengan teknologi (tecnological knowledge) dan pengelolaan (managerial knowledge).¹⁸

Sebenarnya para cendekiawan Islam telah mengawali pengkajian dan pengembangan ekonomi sejak abad pertama Islam diajarkan Rasulullah. Imam Abu Yusuf (w. 798 M), Yahya bin Adam (w. 818 M) al-Hariri (1054-1122 M). Muhammad bin Hasan Tusi (w. 1274 M) dan Ibnu Khaldun (w. 1332-1406 M) adalah cendekiawan muslim penyumbang pengembangan ilmu ekonomi. Perlu dicatat disini bahwa gagasan dasar ilmu Ekonomi ini berasal dari tulisan brilian dari banyak penulis Muslim terkenal seperti Tusi dan Ibnu Khaldun. Definisi ekonomi Tusi secara gamblang menggarisbawahi pentingnya nilai tukar, pembagian kerja dan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, dalam definisinya Ibnu Khaldun (1332-1406 M) sarjana Arab terkenal dari Tunis yang secara universal diakui sebagai bapak ilmu sosial, telah memberikan definisi ekonomi yang cakupannya lebih luas daripada definisi Tusi. Dia melihat lebih jelas daripada banyak ekonom setelahnya tentang relasi yang erat antara ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Acuannya pada “diketahui serta etika” menunjukkan bahwa ia menganggap ekonomi sebagai ilmu yang positif dan normatif. Lebih lanjut dia menggunakan kata “Masses” (*al-Jamhur*) yang menunjukkan fakta bahwa tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan massa dan bukan individu. Hal ini terjadi karena hukum ekonomi dan sosial beroperasi secara massal dan tidak dapat secara signifikan dipengaruhi oleh individu yang terisolasi.¹⁹

Namun dalam ekonomi modern, ekonomi sebagai ilmu dianggap mulai muncul pada tahun 1776 yaitu dengan munculnya Adam Smith dengan karya monumentalnya,

¹⁸Muchtar Ahmad, *Ibid.*, h. 112-113.

¹⁹M.A Mannan. *Ibid.*, 8-9.

an inquiri into the Nature and Causes of the Wealt of Nation, teorinya yang terkenal tentang mekanisme pasar menjadi bahan analisis bagi terbentuknya suatu ilmu yang semakin utuh. Pandangan, pikiran, analisis dan teori yang tertuang dalam buku tersebut membidani lahirnya sistem ekonomikapitalisyangliberal. Saifuddin, 1986 mengungkapkan bahwasistemekonomiinilah yang juga mendorong lahirnya sistem tandingannya, yakni sistem ekonomi sosialis, dimulai dari Karlmark yang membahas dan mengupas kapitalisme dan meramalkan keruntuhannya sekaligus naiknya sosialisme sebagai penggantinya. Menurut pendapat Mark, ini disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis telah sedemikian merajalela dan menimbulkan penderitaan dan kemelartan buruh yang dihisap dan diperas, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. Kenyataanya dewasa ini pertarungan kedua sistem ekonomi itu dalam gelangang dunia justru menunjukkan arah sebaliknya, yakni keruntuhan sosialisme. Dampaknya kepada perkembanganekonomiialahgejalasemakindiyakinikapitalismesebagaidasarpembangunan beberapa negara. Meskipun demikian beberapa pakar ekonomi masih meragukannya, setelah melihatkenyataanketimpanganpendapatanandankemiskinyangmelandakehidupanmanusia di hampir seluruh dunia, dan guncangan ekonomi yang tak teramalkan, termasuk di negara yang sudah lama menerapkan sistem ekonomi yang mungkin lebih cocok untuk menyusun tatananduniayanglebihmenjaminkeadilan,kesejahteraan,danaketentramandalamjangkapendek maupun jangka panjang. Suatu sistem ekonomi yang lebih berada dan lebih manusiawi.²⁰

Di antara alternatif untuk mengembang ekonomi Islam yang sedang adalah Islamisasi ilmu ekonomi kontemporer dan revitalisasi ekonomi Islam. Sejatinnya banyak diskursus dan teoriyangtelahdihasilkanolehislamisasiilmupengetahuankontemporer. Namun yangpaling suksesdankasatmataadalahIslamisasiilmuekonomikontemporerereryangmenghasilkanteori-teori ekonomi khususnya terkait dengan moneter dan perbankan. Akan tetapi, teori-teori tersebut menurut Dawam Raharjo (2000, xxii) teori-teori tersebut hanya dapat dianggap mapan ketika sudah diimplementasikan dan membuahkan hasil yang substansial, umpamanya teori ekonomi Islam mampu menghasilkan pemerataan, pertumbuhan, ketahanan stabilitas, inovasidankemandirianekonomi. Olehsebabitu, Islamisasiilmuekonomikontemporeritidak hanya berhenti pada terwujudnya ilmu ekonomi teoritis. Kemudian ilmu ekonomi Islam itu perlu diimplementasikan dalam bentuk praksis di dunia nyata dan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan. DawamRaharjojugaberpendapatbahwailmuekonomiIslamyangbanyak diaplikasikan yaitu bidang perbankan syariah atau perbankan tanpa riba. Di

²⁰Muchtar Ahmad, 'Kajian Ekonomi dan nilai Islam' dalam Moeflich Hasbullah Ed, *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2000), h. 112-113.

Indonesia telah banyak didirikan lembaga-lembaga, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia), Asuransi Syariah, Takaful, reksadana syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dan BMT (Baitulmal wal Tamwil). Pelaksanaan lembaga-lembaga tersebut sudah saatnya dikaji dan dievaluasi sejauh mana efektifitasnya dan apakah penerapan perbankan syari'ah dapat diterima oleh masyarakat? Hasil kajian dan evaluasi sertapengembangan dan penyempurnaan tersebut dapat menghasilkan *body of knowledge* yang bisa diajarkan melalui proses pendidikan.²¹

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. *Kedua,* status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut.

1. Harta sebagai amanah (titipan, *as a trust*) dari Allah SWT. Manusia hanyalah memegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan bendanya sendiri.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmati hidupnya dengan baik dan tidak berlebihan (Ali Imran:14).
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak (al-Anfaal:28).
4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah (a-Taubah 41,60; Ali Imran:133-134).

Ketiga: Pemilikan harta dapat dilakukan antar lain melalui usaha (*a'mal*) atau mata pencharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi yang mendorong umat Islam untuk bekerja mencari nafkah yang halal. Keempat: dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (at-Takaatsur: 1-2), melupakan dzikrullah (tidak Ingat Allah dengan segala ketentuan-Nya) (al-Munaafiqun: 9), melupakan shalat dan zakat (an-Nuur:37) dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasr: 7). Kelima: dilarang menempuh usahayang haram, seperti melalui kegiatan riba (al-Baqarah:273-281), perjudian, menjual beli dengan barang yang dilarang atau haram (al-maaidah:90:91), mencuri, merampok, peggasaban (al-maaidah:38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthafiffin: 1-6), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah:188), dan melalui suap menyuap (H.R Imam Ahmad).²²

²¹M. Dawam Raharjo, 'Kata pengantar' dalam Moeflich Hasbullah Ed, *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2000), h. xxii.

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 8-10.

Prinsip-Prinsip ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam tidak berusaha membongkar struktur ekonomi pada periode sejarah yang lalu. Ekonomi Islam modern kita akan menjadi *modern*, memanfaatkan teknik produksi dan metode organisasi terbaik yang tersedia. Sifat keislamannya terletak pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang melandasi hubungan manusia, sikap dan kebijakan sosial yang merupakan suatu sistem. Hal-hal ini tidak ditentukan oleh teknik dan cara yang digunakan. Alat-alat produksi, sumber kekuatan dan teknik-teknik ilmiah mampu melayani manusia dalam berbagai sikap, norma dan nilai. Nilai-nilai dan sikap Islam yang mereka ciptakan sangat cocok untuk penggunaan sepenuhnya sarana dan teknik yang tersedia bagi manusia modern. Dalam ranah prinsip-prinsip dan nilai-nilai itulah kita melihat kembali

periode Islam standar dalam sejarah kita terutama pada zaman Nabidankhalifah Rashidun. Al-Qur'an juga membatasi diri pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai tertentu yang luas, sejauh menyangkut aspek ekonomi kehidupan manusia. Itu tidak berlaku untuk struktur masyarakat feodal, kapitalistik atau sosialistik, atau untuk struktur tertentu dalam hal ini. Ini memberikan nilai-nilai yang didefinisikan dengan jelas yang harus memandu kebijakan ekonomi dalam masyarakat Islam terlepas dari waktu dan tempat. Beberapa contohnya adalah: Sikap pemilik terhadap propertinya; kewajiban masyarakat terhadap yang membutuhkan; dasar kerjasama ekonomi; dan larangan yang keras terhadap konsentrasi kekayaan dan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.²³

Prinsip ekonomi, dalam Islam, berasal dari ayat Alquran: ' Dan carilah dengan (kekayaan) yang telah Tuhan berikan kepadamu, Rumah Akhirat, tidak mengabaikan bagianmu di dunia ini, tetapi lakukanlah kebaikan sebagaimana Tuhan melakukan kebaikan kepadamu dan jangan mencari (kesempatan untuk) kerusakan di bumi ini, karena Tuhan tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan '(38: 77). Manusia telah diperintahkan untuk mencari kekayaan yang telah Tuhan limpahkan kepadanya, Rumah Akhirat dan tidak mengabaikan bagiannya di dunia ini, tidak membuat kerusakan di muka bumi tetapi berbuat baik kepada orang lain karena Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Prinsip-prinsip yang bersumber dari ayat ini adalah:

1. Bahwa Allah-lah yang memberik kekayaan kepadamu dan Dia adalah Pemilik segala sesuatu;
2. Manusia itu harus mencari kekayaan Rumah Akhirat, yaitu, dia harus mengeluarkan sodaqoh dan amalsaleh;
3. Bahwa dia tidak boleh mengabaikan bagiannya di dunia ini, yaitu, dia harus bekerja keras dan menghasilkan sebanyak mungkin dengan cara yang jujur dan

²³Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of the Islamic Economy*. (Delhi: Markazi Maktaba Islami), h. 2-3.

halal;

4. Bahwa dia harus berbuat baik kepada orang lain, yaitu, dia harus memenuhi tugasnya untuk masyarakat, dan, daripada menimbun harta, lebih baik menolong dan membantu orang yang membutuhkan;
5. Bahwa dia tidak boleh mencari kesempatan untuk berbuat kerusakan di muka bumi yaitu, dia harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa termasuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar dan transaksi yang tidak adil.²⁴

²⁴Muhammad Muslihuddin. *Economics and Islam*. (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1992.), h.43.

Nilai-nilai sistem Perekonomian Islam



Sepanjang sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang ada, filsafat merupakan dasar orientasinya. Ini dapat disimpulkan dari munculnya buku Adam Smith, *the philosophy of moral*, sebelum karya monumentalnya, *The Wealth of nation*, buku ini dianggap sebagai dasar filosofis teori ekonominya (Takasima, 1971). Demikian pula Karl Mark, Menulis *Das Kapital* bertolak dari filsafat yang muncul pada zamannya, khususnya filsafat Hegel. Atas dasar filsafat itu kajian ekonomi kini menjadi disiplin ilmu tersendiri, dalam kelompok di ilmu-ilmu sosial. Sebabnya tidak lain karena kajian ekonomi memang hasil pengamatan dari gejala sosial dan perilaku ekonomi, yang menyangkut penggunaan sumber dan hasil yang terbatas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan setiap kajian tentang masalah sosial, betapapun terbatasnya ruang lingkungannya seperti ekonomi, sebagian besar ditentukan oleh nilai-nilai sosial masyarakat dan kemampuannya dalam memberikan penilaian terhadap suatu keadaan ataupun perilaku. Nilai dan penilaian mempunyai kaitan erat dengan etika, bahkan dapat dikatakan ditentukan oleh etika.²⁵

Muhammad Syafi'i Antonio memaparkan tentang nilai-nilai sistem perekonomian Islam sebagai berikut:

²⁵Muchtar Ahmad, Muchtar Ahmad, *Ibid.*, h.112-113.

1. Perekonomian masyarakat luas, akan menjadi baik bila menggunakan kerangkakerja atau acuan norma-norma Islam.
2. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh
3. Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut.

Pertama:

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- c. Menjamin *basic need fulfilment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan *amanah at-takaaful al-ijtima'i* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Kedua, Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan yang lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian Islam sangat menganjurkan golongan kaya untuk tetap tawadlu dan tidak pamer. Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi di dalam masyarakat.

4. Kebebasan Individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak seorang pun—bahkan negara mana pun—yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah.

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.

- b. Melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun kedua-duanya merupakan tujuansyariah.
- c. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya. Bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.²⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naquib. 1984. *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abas, Anwar <https://www.republika.co.id/berita/p4tkvr440/agama-dan-ekonomi>
- Ahmad, Muchtar, 2000. 'Kajian Ekonomi dan nilai Islam' dalam Moeflich Hasbullah Ed, *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Hasbullah, Moeflich Ed, 2000. *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Langgulang, Hasan, 1988. *Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- M.A Mannan. 1990. *Islamic Economics Theory and Practice*. Delhi: Idarah-I Adbiyat-I.
- Muslihuddin, Muhammad. 1992. *Economics and Islam*. Delhi: Markazi Maktaba Islami.
- Raharjo, Dawan. 2000. "Strategi Islamisasi Ilmu Pengetahuan" dalam Moeflich Hasbullah Ed, *Gagasan dan Perdebatan Islamisasi Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1981. *Some Aspects of the Islamic Economy*. (Delhi: Markazi Maktaba Islami).
- Waber, Max. 1919. *Sosiologi Agama*. Jakarta: IRCISOD.
- Khan Muhammad Shabbir, 1924. *ISLAM: Social and Economic Structure*. (S.B Nangia: Ashish Publishing House).
- Ala Maududi Syed Abdul, 1980. *Islamic Economic System Principles and Objectives*. (New Delhi: Satish Composing Agency).
- Ehsan Ahmed, 1992. *Economic Growth and Human Resource Development in an Islamic Perspective*. (United States of America: International Graphics Printing Service).
- Shaghil. M, 1989. *Islamic Economics: A Global Perspective*, (S.B Nangia: A Ashish Publishing House).
- Mannan. A. M, 1984. *The Frontiers Of Islamic Economics*. (Delhi: Naveen Shahdara).
- Abu Saud Mahmoud, *Toward Islamization Of Disciplines*. (Herndon, Virginia, U.S.A: International Institute Of Islamic Thought).

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, h.10-17

Ahmad Khurshid, 1980. *Studies In Islamic Economics*. (Jeddah: University Of Glasgow). studies of Islam, Economic, and Governance: A Survey of Some New Developments

Florence Eid. *The American Journal Of Islamic Social Sciences*, Volume 11 Spring 1994 Number 1. (Washington, D.C: Simultaneously).